

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 18 UU No. 23/2011 TENTANG SYARAT-SYARAT
MENJADI AMIL ZAKAT
(Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:
Anisa Meilia
NPM: 1621020151
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2020 M**

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 18 UU No. 23/2011 TENTANG SYARAT-SYARAT MENJADI
AMIL ZAKAT**

(Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh :

**ANISA MEILIA
NPM :1621020151**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/ 2020 M

ABSTRAK

Di Indonesia, Undang-Undang Zakat telah disahkan. Tetapi dalam praktiknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan lainnya atau menurut Peraturan Pemerintah. Lagi pula ketentuan itu memiliki kelemahan terutama pada pasal 18 UU No.23/2011. Oleh karena itu sekelompok orang dan lembaga berinisiatif untuk mengajukan permohonan terkait pembentukan Amil Zakat ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan judicial review. Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengeluarkan Judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat yang diajukan oleh pemohon bertentangan dengan pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945, pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 28 H ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Setelah judicial review hanya satu permohonan dari beberapa permohonan yang dikabulkan oleh MK yaitu pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Dan berdasarkan hasil putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syariah terkait dengan Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Bagaimana Implementasi Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 di kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ? *Kedua*, Bagaimana praktek penerapan pasal 18 UU No.23/2011 jika dikaji melalui *Maqashid Syariah* ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 di kalangan masyarakat Khususnya Pengelola Zakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu serta untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan tersebut jika dikaji melalui perspektif *Maqashid Syariah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk Jenis penelitian lapangan (*field research*), Sedangkan Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (penggambaran). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.

Hasil dari penelitian ini terkait Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat yang dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu secara umum sudah berjalan menuruti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, Hal ini didukung oleh sejumlah fakta sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* khususnya dalam rangka mencapai maksud menjaga kepentingan agama, menjaga kepentingan jiwa dan dan menjaga kepentingan harta.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Meilia
NPM : 1621020151
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU No. 23/2011 (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2020
Penulis,

Anisa Meilia
1621020151



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi
Pasal 18 UU No. 23/2011 (Studi di Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu
Nama : Anisa Meilia
NPM : 1621020151
Jurusan : Syariah
Fakultas : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Ketua Jurusan,

Frenka, M. Si
NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU No. 23/2011 (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)"** disusun oleh **Anisa Meilia**, NPM : 1621020151 Program Studi **Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Mubaddin, M.H.
NIP. 19631221993031002

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubat:60)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita mendapat Syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahan-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtuaku yang telah berjuang untuk ku, terimakasih atas segala jerih payahmu ayahandaku tercinta (Paimun), Ibundaku tercinta (Chasanah Wahyuningsih), juga ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis seorang anak perempuan yang lahir di Margorejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada tanggal 4 mei 1997 yang merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Paimun dan Supinah.

Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Sabiluttaufiq taufiq, lulus pada tahun 2009. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di SMP Islam Adiluwih Pringsewu, lulus pada tahun 2012. Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di SMA Negeri 1 Adiluwih Pringsewu, lulus pada tahun 2015. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 18 UU No. 23/2011 TENTANG SYARAT-SYARAT MENJADI AMIL ZAKAT (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Pimpinan dan karyawannya baik Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dorongan mental doa, dukungan, serta kasih sayangnya.
9. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus Salis Fitriyanti, Ayu Setiani, Royan Anzana yang terkasih serta teman-teman lainnya di Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi

maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2020
Penulis

Anisa Meilia

1621020151

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTARK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikan Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah.....	17
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	17
2. Sejarah Teori Maqashid Syariah	18
3. Klasifikasi Maqashid Syariah	22
B. Kedudukan dan Peran Amil Zakat dalam Islam	32
Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat menurut Pasal 18 UU No. 23/2011.....	43
C. Tinjauan Pustaka	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Tinjauan Umum tentang Kecamatan Adiluwih 49
- B. Perkembangan Lembaga Amil Zakat di Kecamatan Adiluwih 62

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Implementasi Pasal 18 UU No. 23/2011 di Kecamatan Adiluwih..... 69
- B. Analisis Maqashid Syariah..... 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Rekomendasi 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pekon Kecamatan Adiluwih	53
2. Sebaran Penduduk Kecamatan Adiluwih.....	54
3. Jumlah Penduduk	55
4. Luas Produksi Tanaman Palawijaya	59
5. Luas Panen Produksi Tanaman Holtikultura.....	60
6. Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang dibahas ini adalah **“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU No. 23/2011 Tentang Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**. Agar tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul di atas serta untuk mengilustrasikan secara menyeluruh inti sari pembahasan ini, penulis akan menegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain :

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).¹

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *As-syari'ah*. *Maqashid* adalah jamak dari kata *Qashada* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok keadilan. Maka dari

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

itu *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²

3. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan.³

4. Pasal 18 UU No. 23/2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat

Yaitu suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat, pasal itu memuat tentang syarat-syarat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kewenangan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian terhadap implementasi pengelolaan zakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang dianalisis dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

² Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syaitibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Karena masalah pengelolaan zakat selain kewajiban ibadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, juga sebagai bentuk hadirnya orang kaya untuk membantu saudaranya yang kurang mampu secara finansial. Jika zakat bisa dimaksimalkan fungsinya, maka fakir-miskin sangat mungkin untuk bisa dientaskan dari keterpurukan ekonominya.

2. Alasan subjektif

- a. Tersedianya literatur mengenai permasalahan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Topik yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak dikaji orang, oleh karena itu dirasa perlu untuk mengkajinya.
- c. Untuk menambah wawasan bagi pembaca atau mahasiswa khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Amil zakat, disebut di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin, juga bertugas untuk pengumpulan serta pengelola dana zakat. Demikian disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat. Posisi nomor tiga ini tentu bukan tanpa pesan.

Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat.

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah ada terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja, dengan berlakunya undang-undang ini, mengakibatkan terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Yang diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat. Sehingga untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat.⁴

Ditegaskan pula bahwa dengan adanya manajemen zakat, maka pengalokasian zakat diharapkan dapat lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahiq. Dengan adanya manajemen zakat, maka harta zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahiq, serta dapat diketahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu pembinaan.

Oleh karena itu lembaga zakat memiliki peran penting untuk menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), h. 422.

kekurangan dana, sehingga akan terciptanya perekonomian yang stabil. Zakat juga sesuatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat antara lain untuk meratakan jurang antara kaya dan miskin (*the have and the have not*), di mana yang punya kewajiban memberikan bantuan pada yang tidak mampu. Sebaliknya yang tidak mampu berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya.⁵ Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada lembaga zakat, maka tidak ada wadah untuk menyalurkan zakat. Dengan adanya lembaga zakat maka pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, di samping itu zakat yang merupakan wujud dari pada pelaksanaan ibadah rukun yang ke tiga dan merupakan pelaksanaan hukum islam.⁶ yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

⁵Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet, 1), hal. 750

⁶ Peranan Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan” (On-Line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com> (24 September 2012).

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 40.

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubat:103)⁸

Menurut ayat tersebut, zakat harus diambil. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abu Bakar, orang kaya dan tidak berzakat dinyatakan telah murtad. Imam al-Ghazali mengatakan: Allah dan Rasul-nya membuat syari’at dengan beberapa tujuan (*maqashid al-syariah*), yaitu:

1. *Hifz al-din*, untuk memelihara agama.
2. *Hifz al-‘aql*, untuk menjaga akal.
3. *Hifz al-nafs*, untuk menjaga jiwa.
4. *Hifz al-nasl*, untuk menjaga keturunan.
5. *Hifz al-mal*, untuk menjaga harta.

Jika rumusan al-Ghazali ini dikaitkan dengan turunnya perintah zakat, maka kewajiban berzakat itu, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga tiga persoalan pokok yang termasuk di dalam *Maqasid al-syariah*. Ketiga persoalan itu adalah *hifz al din*, untuk memelihara agama, *hifz al nafs*, untuk menjaga jiwa, dan *hifz al mal*, untuk menjaga harta.⁹ Perlu diketahui bahwa syara’ tidak diciptakan hukum-hukumnya secara kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan dan Asbabun Nusul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009), h. 203

⁹Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 27.

umum. Nash-nash yang hakiki tidak dapat dipahami kecuali dengan mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam menciptakan nash-nash itu. Haruslah diingat bahwa petunjuk-petunjuk lafal dan ibaratnya perlu kadang-kadang menerima beberapa makna yang perlu ditarjihkan, yang salah satunya adalah dengan mengetahui maksud syara'.¹⁰

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Di antaranya soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat. Berapa jumlah zakat, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang didapat termasuk hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan para petugas para pembantunya.¹¹

Di Indonesia, Undang-Undang Zakat telah disahkan. Tetapi dalam praktiknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan lainnya atau menurut Peraturan Pemerintah.¹² Lagi pula ketentuan itu memiliki kelemahan terutama pada pasal 18 UU No.23/2011. Oleh karena itu sekelompok orang dan lembaga berinisiatif untuk mengajukan permohonan terkait pembentukan Amil Zakat ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan judicial review.

¹⁰ Khoirul Uman, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h.546

¹² Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.207.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengeluarkan Judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat yang diajukan oleh pemohon bertentangan dengan pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945, pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 28 H ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Setelah judicial review hanya satu permohonan dari beberapa permohonan yang dikabulkan oleh MK yaitu pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Dan berdasarkan hasil putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syariah terkait dengan pengelolaan zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat dan menelaahnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 18 UU No.23/2011 TENTANG SYARAT-SYARAT MENJADI AMIL ZAKAT (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**

D. Fokus Penelitian

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan dari fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring informasi.¹³ Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat difahami bahwa penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi pasal 18 UU No.23 tahun 2011

¹³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44

Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat sebagaimana yang ada di kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 di kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ?
2. Bagaimana praktek penerapan ini jika dikaji melalui *Maqashid Syariah* ?

F. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 di kalangan masyarakat Khususnya Amil Zakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan tersebut jika dikaji melalui perspektif *Maqashid Syariah*.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pengelolaan zakat maupun

yang membayar zakat, serta memberikan pemahaman yang lebih mengenai pelaksanaannya sesuai dengan pokok-pokok yang terkandung dalam *Maqashid Syariah*.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁴ Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Kecamatan

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.21.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2.

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini dikhususkan Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat.

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (penggambaran). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁶ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari Amil Masjid yang mengelola zakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya

¹⁶Suharsimi Arikato, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 1993), h.309

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), h.105

¹⁸Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁹ Sehingga data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁰ Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung di mana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang dinyatakan. Wawancara ditunjukan kepada Amil Zakat yang ada di Masjid-Masjid di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak tegang, sehingga dalam mendapatkan informasi yang diinginkan dapat tercapai.

b. Metode Dokumentasi

¹⁹*Ibid*, h. 40

²⁰Masri Singarimbun, Sofian efendi, *Metode Penelitian survai*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995), h. 192

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²¹

Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²² Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam artian apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

c. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.²³ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁴ Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap Amil Zakat yang ada di Masjid-Masjid di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 274

²² Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 125

²³ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: 2015), h. 105

²⁴ Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Prenada Media Group, Cetakan kelima, 2011), h. 118

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²⁵ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.²⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola Lembaga Amil Zakat yang ada di Masjid-Masjid di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁸

Sesuai penjelasan di atas karena populasinya lebih dari 100 maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari 396 adalah 39,6 dibulatkan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173

²⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 53

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta cv, Cetakan ke 15, 2010), h. 116

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 104

menjadi 40 orang yang akan dijadikan sampel di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu .

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.²⁹ *Purposive sampling* juga disebut dengan *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini individu-individu yang dijadikan sampel adalah Amil Zakat, sampel yang dimaksudkan agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk dianalisa.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden terkumpul. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat mengerti. Data yang telah diperoleh di lapangan dianalisa dengan

²⁹ *Ibid*, h. 122

menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk diambil secara kesimpulan.³⁰ Teknik analisa yang digunakan adalah induktif Deskriptif Analisis, yaitu dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan terkait dengan Lembaga Amil Zakat yang ada di Masjid-Masjid di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.³¹

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998). h. 133

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 282.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid berasal dari kata *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti : berniat, bermaksud, menghendaki. Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.³²

Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asl-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.³³

Para Ulama *Ushul Fiqih* mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna atau tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-Syari'ah* di

³²A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984), h. 1123.

³³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), h. 233

kalangan ulama *Ushul Fiqih* disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia atau maksud yang tersirat yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*. Berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁴ Al-Syatibi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai kemaslahatan yang berasal dari Tuhan, yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka hal itu bukan dikatakan sebagai maksud atau tujuan dari Tuhan. Karena, semua yang ia ciptakan pastilah memiliki nilai manfaat dan keuntungan bagi umatnya. Jika, kemaslahatan yang dicapai hanya sebatas kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat maka hal ini bukanlah *maqashid al-syari'ah* yang diinginkan.³⁵

2. Sejarah Teori Maqashid Syari'ah

Konsep *Maqashid Syariah* sesungguhnya sudah ada sejak awal diturunkannya Al-Quran dan Hadits, karena *Maqashid syariah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi selalu menyertainya,³⁶

Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam. (al-Anbiya (21) ayat 107³⁷

³⁴ Arif Wibowo, *Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, (Islamic Finance_04,2012),h.2.(Online).Tersediadi<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Arif%20Wibowo,%20MEI/ISLAMIC%20FINANCE%2004%20-%20Maqashid%20Asy%20Syariah.pdf>, (diakses pada 10 Februari 2020, pukul 2.12 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁵ Muhammad Mawardi Jalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq al-syatibi dalam kitab al-muwafaqat" h.296,(Online).Tersediadihttp://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maqashid&btnG=, (Diakses pada tanggal 11 Februari 2020, Pukul 7.20 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

³⁶Sandy Rizky Febriadi, Juli 2017, "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah", *Amwaluna*, Vol. 1 No. 2, h.235

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan....*, h. 331

Teori *maqashid syariah* juga sudah diterapkan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan generasi mujtahid sesudahnya termasuk ulama-ulama besar, seperti Imam Malik dalam karangannya yang berjudul *Al-Muwaththo'*, Imam Syafi'i dalam karyanya yang sangat populer yang berjudul *Ar-risalah*, dan masih banyak lagi hingga sampai pada As-Syatibi. As-Syatibi bisa menarik perhatian banyak orang karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecceer dan dibahas sepotong-potong oleh orang-orang sebelumnya menjadi pembahasan tersendiri dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* yang dikhususkan membahas tentang *Maqashid Syariah*.

Ulama ushul mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sudah ada petunjuk (perintah) yang mengungkap peranan penting *Maqashid Al-Syari'ah* dalam pembentukan hukum Islam. Contohnya di dalam sebuah hadits Rasulullah melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging qurban, kecuali sekedar bekal untuk selama tiga hari. Beberapa tahun kemudian, ada beberapa orang sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah itu dengan menyimpan daging qurban lebih dari sekedar pembekalan selama tiga hari. Peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah membenarkan serta menjelaskan bahwa : ”dahulu aku melarang menyimpannya (daging qurban) karena kepentingan *al-daffah* (para pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging qurban). Sekarang simpanlah daging-

daging qurban itu (karena tidak ada lagi para tamu yang membutuhkannya).

Bahkan dalam hadits lain Rasulullah melarang Ziarah kubur karena dikhawatirkan akan menjadi pemujaan yang berlebih-lebihan terhadap arwah orang yang telah wafat (mengkramatkan), sehingga menimbulkan kesyirikan. Tapi kemudian Rasulullah membolehkan umat Islam untuk berziarah. Dari peristiwa itu ada petunjuk dan arti penting *Maqashid Al-syari'ah* dalam penetapan hukum. Seperti kasus daging qurban di atas, larangan menyimpan daging qurban adalah memberi kelapangan bagi Badui yang datang dari perkampungan. Ini adalah *Maqashid al-syari'ah* dari larangan itu. Tetapi setelah orang Badui tersebut tidak membutuhkan, maka larangan menyimpan daging qurban tidak diberlakukan lagi. Begitu juga dengan hadits yang kedua tentang menziarahi kuburan yakni dikarenakan takut jatuh kedalam kesyirikan. Akan tetapi dalam beberapa tahun kemudian di mana keimanan mereka sudah baik (sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang bathil), maka Rasulullah tidak melarangnya lagi. Begitu juga sebagai contoh kasus Utsman ibn Affan yang menikahi Nailah, anak Farfisah Kalbiyah (Bani Kalb) yang beragama Nashrani, lalu perempuan tersebut masuk Islam sesudah menikah dengannya, padahal sebelumnya istrinya itu memeluk agama Nashrani.

Peranan *Maqashid al-syari'ah* juga telah ditunjukkan oleh para sahabat dalam berijtihad (bermusyawarah untuk menentukan suatu hukum Islam), karena perubahan kondisi, zaman, tempat dan keadaan

yang jauh berbeda dari zaman Rasulullah. Dalam berbagai praktek ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, terutama di bidang muamalah yang belum ada pada masa Rasulullah, selama diketahui tujuan hukumnya, maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode qiyas.³⁸ Ini membuktikan bahwa *Maqashid al-syari'ah* telah ada pada zaman Rasulullah, akan tetapi hal tersebut belumlah diistilahkan dalam kategori ilmu-ilmu (*ushul fiqh*).

Teori *Al-syar'iah* pertama kali dikenal pada abad keempat Hijriah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al-Turmuzi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya, yaitu: *al-shalah wa qasiduhu, al-Haj Wa Asraruh, al- 'illah, 'llal Al-Syar'iah* dan juga bukunya al-Faruq yang kemudian diadopsi oleh Imam Qarafi menjadi buku karangannya.

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Manzur Al-Maturudi dengan karyanya *Ma'had al-Syara'* kemudian disusul oleh Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi dengan bukunya *Ushul Fiqih* dan *Mahasin al-Syariah*, setelah al-Qaffal kemudian muncul Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya yaitu: "*Mas'alah al-jawab wa al-dalil Wa al- 'illah*" dan "*al-Taqrif Wa al-Irsyad fi tartib turuq al-Ijtihad*."

Setelah sepeninggal al-Baqilany munculah al-Juwainy, dengan beberapa karangannya. Beliau adalah orang yang pertama

³⁸A. Intan Cahyani, Teori dan Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah, (Al-Qadau Vol. 1 No. 2, 2014), h.20 (Online). Tersedia di <http://journal.uin-jalaudidin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637>. (diakses 02 april 2020 pukul 21.00 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

mengelompokkan *Maqashid al-syar'iah* menjadi tiga kategori besar, yaitu: *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Kemudian pemikiran beliau dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, al-Razy, al Amidy, Ibnu Hajib, al-Baidawi, al-Asnawi, Ibnu Subuki, Ibnu Abdissalam, al-Tufi, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.

Menurut Hamidi al-Ubaidy, orang yang pertama membahas *Maqashid al-Syar'iah* adalah Ibrahim al-Nakh'i seorang tabi'in sekaligus guru Abu Hanifah. Setelah itu kemudian muncul al-Ghazali, Izzudin Abdissalam, Najamuddin al-Tufi dan terakhir Imam al-Syatibi (wafat 790 H),³⁹ Al-Syatibi lah yang merumuskan konsep *Maqashid Al- Syari'ah* sebagai suatu teori dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat*.

Pada masa sesudah al-Syatibi, Ibnu 'Asyur mempromosikan *Maqashid Syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Setelah Ibnu 'Asyur konsep *maqashid syariah* menjadi rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama yang berkaitan dengan masalah Islam dan modernisasi, sosial, politik, dan ekonomi global, serta persoalan membangun etika global dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia.

3. Klasifikasi Maqashid Syariah

a. Kebutuhan *al-Dharuriyat* (primer)

Dharuriyat (kebutuhan pokok) adalah adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat

³⁹Asafir Jaya, Basri, *Konsep Maqashid Asy-Syar'iyah menurut Akitab al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 123.

kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴⁰

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara kehormatan dan keturunan, memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.⁴¹

1). Perlindungan terhadap Agama

Hak-hak manusia yang paling nyata, dan yang selalu ditegaskan oleh nash-nash dalam syariat Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.

Di dalam Alquran juga banyak disebutkan ayat-ayat yang mengenai berbagai macam hukum, seperti hukum sedekah dan membagi *ghanimah* kepada yang berhak, demi menjaga urusan perekonomian orang-orang yang membutuhkan.⁴²

Allah SWT berfirman,

⁴⁰ Muhammad Zaki, Desember 2015, "Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", Vol. 3 No. 2, h. 316.

⁴¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*.... h.234

⁴² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.16

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubat(9): 60)⁴³

2). Perlindungan terhadap Jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ
اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Naml (27) : 88)⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bagaimana hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu ia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang ia kehendaki.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*...., h. 196

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*...., h. 384

Selanjutnya tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran serta hukum Islam. Perbuatan itu dipandang menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah, serta mencabut ikatan ketaatan (berperang teguh pada tali agama Allah) dan penghambaan kepada Tuhan semesta alam, termasuk merupakan tindakan yang menyalahi aturan terhadap hak-hak seluruh masyarakat.

Kemudian Allah mengkaruniakan nikmat-nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠﴾

Dan sesungguhnya kami muliakan anak cucu adam, dan angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yng kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' (17): 70)⁴⁵

3). Perlindungan terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Nikmat dalam diri manusia ini

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*...., h. 389

membukakannya cakrawala kehidupan. Dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Dia beralih dari perjalanan hidupnya; memiliki memperbaiki stratanya; berjalan di belakang segala sesuatu yang baru; menjalin kehidupan materi dan spiritualnya; menyambung penemuan dan inovasinya di medan politik, militer, dan sosial; mengalahkan semua problematika yang merintang aktivitasnya, dan menghalangi dirinya dengan realisasi semua yang menjadi targetnya.⁴⁶

Islam seringkali mengingatkan tentang nilai dan bagaimana perwujudan daripada kemuliaan orang-orang yang menggunakan akalunya, menyanjung orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memeperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, mahluk yang mulia, dan keserasiannya yang mana akan merujuk kepada pemikirannya tentang bagaimana Allah SWT memberikan segala nikmat yang Allah berikan. Umar bin Khatab berkata,

“Asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalunya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalunya.”

Maka manusia mengoprasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan yang bermanfaat, serta yang baik dan buruk. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang

⁴⁶Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah...., h.35

ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka.

Akal di ibaratkan seperti ikatan dengannya dapat mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan mengerjakan kemungkaran. Mengapa di ibaratkan seperti ikatan? Karena akal pun jika tidak di jaga dapat menyerang balik pemiliknya yang seharusnya ia dapat mengontrol hawa nafsu justru malah tidak membiarkannya.

4). Perlindungan terhadap Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.

Pada awal masa Islam, sanksi bagi wanita yang berzina adalah dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati. Sedangkan sanksi bagi laki-laki berzina adalah dengan disiksa (ta'zir atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka dia dilepaskan dari hukuman tersebut.⁴⁷

وَالَّتِي يَأْتِيَنِ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ
فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٦

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa (4):15-16)⁴⁸

Setelah itu turun ayat dalam Surah al-Nur yang menghapus hukum dari dua ayat inilah yang menjadi hukum sanksi bagi orang yang berzina, yakni dengan pencambukan dan pengasingan *ghairu muhsan* (bagi pelaku yang belum menikah), dan dengan hukum raja bagi yang muhsan, yakni laki-laki yang baligh dan berakal, yang berhubungan seksual melalui qubul (dubur) seorang wanita sedang dia memiliki pernikahan yang sah, meskipun perbuatan ini

⁴⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah..., h.42

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*..., h. 80

dilakukan hanya sekali. Islam sangat mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-mata, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang berkenaan dengan pelecehan kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

5). Memelihara Harta

Di dalam ajaran Islam harta dan benda termasuk kedalam kepemilikan seorang mukmin yang apabila mukmin tersebut hartanya di rampas maka berhak bagi dia untuk merebut harta tersebut, bahkan ada dalam salah satu riwayat ketika kita membela diri pada saat harta kita di rampas maka kita mati dalam keadaan berjihad.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hal Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut.

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindakan pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau monopoli.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (QS. Az-Zariyat (51): 19)⁴⁹

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*...., h. 521

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah (2): 195)⁵⁰

Di dalam Islam harta dan benda termasuk ke dalam kepemilikan seorang mukmin yang apabila mukmin tersebut hartanya dirampas akan berhak bagi dia untuk merebut harta tersebut, bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan seseorang yang mati membela diri ketika harta kita di rampas, maka ia mati dalam keadaan berjihad. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakan atau merampas harta orang lain tersebut.

b. Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder)

Yaitu suatu kebetulan dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.⁵¹

c. Kebutuhan *Tahsinīyat*

Kebutuhan *Tahsinīyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*...., h.30

⁵¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*...., h.46

yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan ahlak.⁵²

B. Kedudukan dan Peran Amil Zakat dalam Islam

Dalam buku-buku Fiqh Ibadah dijelaskan bahwa tidak ada ayat al-Quran yang menjelaskan tentang lembaga yang berwenang mengelola zakat. Demikian juga halnya terhadap muzakki apakah harus langsung menyerahkan kepada mustahik atau harus melalui lembaga pengelolanya (penguasa). Dalil-dalil yang memberi isyarat tentang adanya lembaga yang bertugas mengelola harta zakat adalah:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠﴾ [سورة
التوبة, ٦٠]

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubat (9): 60

Ayat di atas menerangkan yang menetapkan bahwa amil zakat salah satu di antara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka.

⁵² Satria Effendi, *Ushul Fiqh....* h.236

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ [سورة التوبة, ١٠٣]

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Taubat (9): 103)

Selain dari ayat di atas ada pula dalil dalam bentuk hadist yang diterima dari Mu'az ibn jabal yang menerangkan bahwa Nabi SAW memerintahkan agar memungut biji-bijian dari hasil biji-bijian dan kambing.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: خُذْ لِحَبِّ مِنَ لِحَبِّ وَالشَّاةِ مِنَ الْغَنَمِ
وَالْعَيْرُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ

Artinya”Bahwasannya Rasulullah s.a.w mengutus Mu’az ke Yaman, lalu beliau berkata: “Ambillah biji dari biji-bijian, kambing betina dari kambing, unta betina dari unta dan sapi betina dari sapi.” (H.R.Abu Dawud)

Dari Ayat dan Hadits tersebut cukup sebagai alasan mengatakan adanya lembaga pengelola zakat, yang disebut amil zakat.⁵³

Rujukan tentang peran dan kriteria amil zakat tentu adalah kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau di masa hidupnya telah mengangkat beberapa sahabat yang mahir dan mumpuni, untuk diserahkan tanggung jawab manajemen zakat secara profesional. Ibnu Sa’ad menerangkan nama-nama petugas zakat yang telah diangkat sebagai

⁵³Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 233

petugas resmi di masa Rasulullah SAW.⁵⁴ Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (*zakah al-fithr*) sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakah al-mal*) yang sejak awal bersifat wajib. Mekanisme pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi Muhammad adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah. Penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah di mana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat. Penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (*self-assessment*), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian. Dijelaskan pula dalam buku pemanfaatan zakat bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi

⁵⁴Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.10

zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.⁵⁵

Adapun landasan dari *ijma'*⁵⁶ yaitu setelah Nabi Muhammad Saw wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Assidiq, sebagai khalifah yang pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.⁵⁷

Ketika Nabi Muhammad wafat, terdapat pihak yang memunculkan permasalahan apakah zakat dibayarkan kepada Nabi secara pribadi ataukah kepada pemerintah. Di masa *Khalifah* Abu Bakr (632-634), beberapa kabilah Arab Baduwi menolak membayar zakat dengan beranggapan bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi sehingga ketika Nabi wafat zakat tidak lagi wajib ditunaikan. Tercatat dalam sejarah, Abu Bakr memerangi mereka yang menolak membayar zakat ini, yang dikenal sebagai perang *riddah*. Peristiwa ini banyak disalahpahami beberapa kalangan, terutama para orientalis, sebagai bukti bahwa karakter zakat masih belum jelas di masa Nabi Muhammad dan implikasinya, Abu Bakr-lah orang yang bertanggung jawab

⁵⁵Masdhaf f. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 17

⁵⁶*Ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi

⁵⁷Imam al-Suyuti, *Tarikh Khulafah*, diterjemahkan oleh syamsul Rahman, dengan judul "Sejarah Penguasa Islam" (cet 1: Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), h. 79

atas institusionalisasi zakat sebagai sebuah kewajiban pajak permanen dalam Islam. Klaim ini dibantah al-Qardhawi (1973) yang berargumen bahwa permasalahan ini bukan karena masih belum jelasnya konsep zakat saat itu, melainkan lebih karena kabilah-kabilah itu baru memeluk Islam dan masih banyak terpengaruh kehidupan baduinisme mereka (*ghalabat al-badawah 'alayhim*).⁵⁸

Senada dengan apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa peristiwa historis ini, yaitu kebijakan *Khalifah* Abu Bakr memerangi mereka yang menolak membayar zakat, juga banyak dijadikan pembenaran untuk penerapan zakat secara paksa oleh negara. Nsmun Abu 'Ubayd (w.224/438) menginformasikan bahwa yang diperangi Abu Bakr hanyalah mereka yang menolak membayar zakat bintang ternak (*sedekah al-mawashi*), sedangkan mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak (uang) dibiarkan dan tidak diperangi oleh Abu Bakr. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat sebagai bagian dari institusi keuangan publik Islam memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi ritual dan dimensi politik.

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu 'Ubayd (w. 224/838). Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakr, zakat dikelola oleh khalifah diserahkan kepada orang yang dipercayakan untuk

⁵⁸Yusuf Wibowo, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.

mengelolanya. Demikian pula di masa ‘Umar, zakat diserahkan kepada ‘Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Namun pasca ‘Usman Terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan ‘Ali, terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Muslim. Sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik.

Tidak hanya itu, Ibn Taimiyah (1263-1328) dalam *Majmu Fatwa* menginformasikan bahwa di Mesir di masa dinasti Mamluk pengelolaan zakat oleh negara penuh dengan penyimpangan dari ketentuan. Zakat sering dikenakan bukan pada harta yang seharusnya, bahkan dikenakan terhadap harta yang dikecualikan oleh syari’ah. Tarif zakat tidak dibatasi pada hasil pertanian. Zakat juga sering kali dipungut sebelum waktu satu tahun berlalu.

Bahkan hampir tidak ada informasi yang memadai tentang detail pengelolaan zakat dalam sejarah Islam. Namun praktik pengelolaan zakat di dunia Islam yaitu di Jazirah Arab, Turki ‘Utsmani dan Maghal India, menunjukkan beberapa pola umum yang khas yaitu: (i) pengumpulan zakat oleh negara hanya pada harta yang “terlihat” (*amwal al-zhahirah*) dengan atau tanpa istilah zakat, sedangkan zakat untuk harta yang “tidak terlihat” (*amwal al-bathinah*) dibayarkan secara sukarela; (ii) pengumpulan zakat oleh negara tidak dilakukan oleh institusi khusus, namun termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum; dan (iii) zakat *fitriah* (*zakat al-fithr*) selalu dilakukan secara sukarela.

Terlihat jelas bahwa karakter politik zakat, yaitu pembayaran zakat *amwal al-zhahirah* ke penguasa, mengalami pasang surut, tidak selalu dipatuhi oleh publik Muslim. Pelaksanaan zakat secara politik banyak bergantung pada tingkat kepercayaan publik Muslim kepada negara. Adapun karakter ritual zakat, yaitu tertunaikannya kewajiban zakat *amwal al-bathinah* dan disampaikannya zakat kepada mustahik, selalu dipatuhi dan dilakukan publik Muslim di sepanjang sejarah sebagai urusan pribadi, tanpa intervensi negara.⁵⁹ Al-Qardhawi memilih dan menguatkan dua pendapat Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat dalam fikih Islam. *Pertama*, pengelolaan zakat merupakan bagian dari otoritas pemerintahan Muslim, di mana pemerintahan berhak mengumpulkan zakat dari seluruh jenis harta, baik yang *zhahir* maupun yang *bathin*, terutama ketika penguasa mengetahui bahwa rakyatnya melalaikan kewajiban zakat. *Kedua*, kegagalan pemerintah mengelola zakat, dengan membiarkan dan tidak memungut zakat dari masyarakat, tidak menghapus tanggung jawab individu dari pembayaran zakat, di mana muzaki tetap harus menilai zakat yang harus dibayarkan dan menyalurkannya sendiri kepada mustahik.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah sarana. Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampainya zakat kepada mustahik secara tepat sasaran dan dengan kaidah fikih kontemporer, *al-'ibrah bi maqashid al-syari'ah* (*ibrah* harus mengacu pada tujuan *syari'ah*) dan sesuai dengan maksud dan tujuan

⁵⁹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia*...., h. 139

syari'ah. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi menetapkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.⁶⁰ Maka pengelolaan zakat oleh negara hanyalah instrumen dan bukan tujuan, akan lebih melindungi *mashlahah* dengan mendorong lahirnya kebijakan berorientasi syariah (*siyasah syar'iyyah*), yang berfokus pada kemanfaatan (*shalah*) dan menjauhkan dari kerusakan (*fasad*).

Seluruh pembahasan di atas memperlihatkan bahwa dalam menjalankan fungsi kewenangannya dalam pemungutan zakat, pemerintahan Islam harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ajaran agama dalam bentuk tidak bersikap *zhalim*, memungut dan mendistribusikan zakat sesuai ketentuan *syari'ah*, memungut zakat *amwal al-zhahirah* saja dan memberi kesempatan kepada muzaki untuk membagikan sendiri sepertiga atau seperempat dari zakatnya. Ketika kualifikasi di atas tidak terpenuhi, maka dimensi politik zakat tidak lagi menjadi wajib, yang tersisa hanyalah dimensi ritualnya saja, yaitu: zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melalui pemerintah maupun tidak.

Pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan, ia hanyalah sarana. Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampainya zakat kepada

⁶⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), hal. 259-560

mustahik secara tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang paling optimal. Adapun pemungutan zakat secara paksa oleh pemerintahan sekuler di mana Islam tidak menjadi dasar pemerintahan, tidak memiliki landasan fikih yang memadai. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar negara Muslim kontemporer saat ini memungut zakat secara sukarela dan membiarkan, bahkan mendorong, masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola zakat.⁶¹ Secara menarik, akomodasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional oleh UU No. 38/1999 ini mendapatkan dukungan fikih dari otoritas keagamaan nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat yang lahir pada 3 maret 2011, berselang beberapa bulan sebelum lahirnya UU No. 23/2011, MUI menegaskan bahwa Amil Zakat dapat berasal dari unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat (lembaga swasta) yang disahkan oleh pemerintah. MUI secara jelas menolak pendapat fikih yang diadopsi UU No. 23/2011 bahwa pengelolaan zakat hanya dapat dilakukan oleh negara.

1. Syarat-syarat Amil Zakat

Menurut hukum Islam Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Hendaklah dia seorang muslim*, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.

⁶¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*...., h. 150

- 2) *Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- 3) *Petugas zakat itu hendaklah orang jujur*, karena ia diamanati harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta. Atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
- 4) *Memahami hukum-hukum zakat*. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakat dan yang tidak wajib zakat. Juga urusan zakat urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
- 5) *Kemampuan untuk melaksanakan tugas*. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam Quran:

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s. berkata kepada raja: “jaikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kata penjaga (hifzu) berarti dapat dipercaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua syarat itu adalah asas segala pekerjaan yang berhasil.

- 6) *Pengangkatan kerabat* Kebanyakan para ulama melarang kerabat Nabi dianggap sebagai amil zakat. Mereka itu adalah keluarga Bani Hasyim. Beralasan dengan hadist Fadhal bin al-Abbas dan Muthallib bin Rabi'ah kepada Nabi untuk diangkat menjadi petugas sedekah. Salah seorang dari mereka berkata; “Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu agar engkau perintakan kami mengurus sedekah-sedekah ini. Kami akan melaksanakan seperti yang dilaksanakan orang. Juga kami akan menunaikan tugas seperti orang lain.

- 7) *Amil zakat disyaratkan laki-laki*. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki, mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah. Pendapat tersebut tidak mengemukakan alasan kecuali kata-kata Nabi s.a.w. yang berbunyi:

“Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan”. Dalam batasan hadits ini, di antara para ulama

ada yang memberi alasan, bahwa tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan amil zakat yang diangkat dari kaum wanita.

- 8) *Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.*⁶²

C. Pengelolaan Zakat menurut Pasal 18 UU No.23 tahun 2011

Sebagaimana termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat disebutkan bahwa tentang pembentukan lembaga amil zakat yaitu Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut hanya akan diberikan jika memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut

Pertama; Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam Islam pendidikan, dakwah, dan sosial: artinya Laz sudah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia, baik organisasi masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan pemuda dan lain sebagainya.⁶³

Kedua; Berbentuk lembaga berbadan hukum: idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat. Tetapi boleh saja dibentuk oleh masyarakat sepanjang harus berbadan hukum.⁶⁴

⁶²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1999), h. 551.

⁶³ Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 23/2011

⁶⁴ Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 23/2011

Ketiga; Mendapat rekomendasi dari BAZNAS (badan amil zakat nasional): artinya harus mendapat izin secara resmi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri sebagai salah satu lembaga zakat dari Badan Amil Zakat Nasional dalam membantu BAZNAS menghimpun zakat masyarakat.⁶⁵

Keempat; Memiliki pengawas syariat: dalam artian pengelolaan zakat harus diawasi oleh pengawas yang memahami hukum-hukum tentang syariat terutama dibidang zakat.⁶⁶

Kelima; Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya: artinya seluruh staff atau anggota LAZ mempunyai kompetensi dan pengalaman dibidangnya masing-masing. Baik dibidang teknis, administrasi maupun perihal pengelolaan keuangan serta yang bisa membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat.⁶⁷

Keenam; Bersifat nirlaba: maksudnya tidak bertujuan untuk mencari profit berupa uang melainkan lebih fokus ke tujuan sosial dan lingkungannya.⁶⁸

KeTujuh; Memiliki program untuk mendayagunakan zakat kesejahteraan umat: artinya LAZ mempunyai program kerja yang jelas,

⁶⁵ Pasal 18 ayat 2 huruf c UU No. 23/2011

⁶⁶ Pasal 18 ayat 2 huruf d UU No. 23/2011

⁶⁷ Pasal 18 ayat 2 huruf e UU No. 23/2011

⁶⁸ Pasal 18 ayat 2 huruf f UU No. 23/2011

seperti halnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sebagai wujud dari mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat.⁶⁹

Delapan; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁷⁰

Oleh pihak yang bekopeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor, serta laporan pertanggung jawaban per tahun harus ada bik dari data yang masuk maupun yang keluar dan data itu siap diauditkan oleh lembaga audit syariah.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan penelitiannya. Setelah peneliti melakukan *research* terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian dimaksud antara lain :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Siti Lestari dari UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal terlaksana. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan

⁶⁹ Pasal 18 ayat 2 huruf g UU No. 23/2011

⁷⁰ Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 23/2011

bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang bersifat produktif yakni diberikan kepada para *mustahiq* dalam bentuk pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu lembaga ini juga memberikan bantuan modal untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengambilannya dicicil selama sembilan kali. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat pengalokasian zakat produktif di antaranya : (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan *mustahiq* yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran *mustahiq* (4) susahny mencari *mustahiq* yang benar-benar bisa dipercaya.

Kedua penelitian skripsi Risnawati.T dari IAIN Kendari tahun 2018 yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kediri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan zakat di masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua kota Kediri. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari, sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Meskipun demikian ada beberapa hal yang harus diperbaiki dikarenakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik khususnya dalam hal pengorganisasian dan pengawasan.

Ketiga, penelitian skripsi dari Budi dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 dengan judul “ Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ di kabupaten Tulang Bawang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk menunjang program pendidikan dengan cara memberikan bantuan dana beasiswa kepada peserta didik yang orang tua-nya tergolong miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan. Di samping itu ada pula program ekonomi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan wirausaha dan bantuan kepada korban banjir agar penderitaan mereka dapat menjadi ringan serta tidak ada yang terlantar.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang diteliti, pendekatan yang digunakan serta lokasi di mana penelitian ini dilakukan. Objek penelitian ini berfokus pada pasal 18 UU Nomor 23/2011, menggunakan pendekatan / analisis *Maqashid Syariah*, serta dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Tinjauan Umum tentang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

1. Sejarah Singkat

Kecamatan Perwakilan Adiluwih dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan surat Gubernur TK 1 Lampung Nomor: b/305/B/II/ HK/1990 tanggal 27 Agustus 1990 dan surat persetujuan Menteri dalam Negeri Nomor: 138/1433/PUOD tanggal 24 April 1990. Pada mulanya Kecamatan Perwakilan Adiluwih merupakan wilayah kerja Kecamatan Sukoharjo, Pada tanggal 28 Januari pekon Tritunggal Mulyo masuk dalam wilayah Kecamatan Adiluwih sebagai pemekaran dari Kecamatan Gading Rejo sehingga jumlah pekon dalam Kecamatan Adiluwih menjadi 10 pekon. Kemudian berdasarkan surat Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor: 09 tahun 2000 tanggal 19 Juli 2000, Kecamatan Perwakilan Adiluwih di tetapkan menjadi Kecamatan yang definitif (Kecamatan Adiluwih) dengan ibu kota Kecamatan di Adiluwih.

Semasa Kecamatan Adiluwih berstatus perwakilan, wilayah ini telah dipimpin oleh Camat pembantu antara lain sebagai berikut:

1. Drs. Iskandar Alamsyah tahun 1990 s/d 1994
2. Drs. Chottob tahun 1994 s/d 1999
3. Drs. Nasrun Yusuf tahun 1999 s/d 2000

Ketika pemerintahan Kecamatan ini berubah menjadi Kecamatan definitif, yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor: 09/2000 tanggal 19 Juli 2000 dan diresmikan pada tanggal 22 Agustus 2000, pejabat pimpinan kecamatan (Camat) secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Drs. Nasrun Yusuf (tahun 2000 s/d 2003).
2. Drs. H. Arifin Basroni (tahun 2003 s/d 2005).
3. Drs. H. Supartono (tahun 2005 s/d 2007).
4. Drs. Ananto Pratikno (tahun 2007 s/d 2008).
5. Edi S. Pamungkas, S.Sos (tahun 2008 s/d 2 Februari 2010).
6. Drs. Ananto Pratikno, M.M (2010 s/d 2011).
7. Humaidi Elhudri (tahun 2011 s/d Agustus 2011).
8. Edi. S. Pamungkas, S.Sos., M.M (Agustus 2011 s/d Januari 2013).
9. Hi. Sukri, S.E (Januari 2013 s/d Maret 2014).
10. Dewanto Dwi Utomo, S.H (Maret 2014 s/d Mei 2016).
11. Drs. Sunargianto, M.Pd (Mei 2016 s/d 31 Desember 2016).
12. Drs. Khaniffudin (3 Januari 2017 s/d 5 Februari 2018).
13. Sutaryo BBA, S.Pd (5 Februari s/d 1 Desember 2019).
14. Gandung Hartadi S.Pd ., M.M (1 Desember 2019 s/d sekarang).

Sesuai dengan Perda 12 tahun 2002 tentang pelimpahan tugas Bupati kepada Camat, tugas-tugas pokok pemimpin wilayah Kecamatan (Camat) meliputi bidang-bidang berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Bidang pemerintahan
3. Bidang pembangunan
4. Bidang pelayanan masyarakat

Khusus mengenai bidang pelayanan pada warga masyarakat kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi pelayanan:

- Legislasi KTP, KK, akta kelahiran dan SKTM
- Surat pindah
- Kelakuan baik
- Catatan sipil
- Izin keramaian dan lain-lain.

Selain kantor camat yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan di Kecamatan Adiluwih juga terdapat sejumlah kantor-kantor Dinas/ Instansi lain yang meliputi :

1. Kasub sektor Adiluwih (gedung sendiri)
2. Porsamil Adiluwih (menyewa)
3. Kantor cabdin P & K (gedung sendiri)
4. Kantor urusan agama (gedung sendiri)
5. KCD pertanian (gedung sendiri)
6. KCD Disbun (menyewa)
7. Puskesmas Adiluwih (gedung sendiri)
8. Puskesmas Bandung Baru (gedung sendiri)
9. Puskesmas 5 buah

10. Posyandu 35 buah

11. Klinik bersalin 4 buah.

Selain daripada itu, ada pula kantor instansi lain yang khusus mendukung perekonomian rakyat, yakni :

1. BRI Unit 1 buah

2. KUD 1 buah

2. Aspek Geografis Kecamatan Adiluwih

Kecamatan Adiluwih memiliki luas kurang lebih 56,73 km dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyumas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.⁷¹

Kecamatan Adiluwih terletak pada ketinggian 114 M di atas permukaan laut dengan kondisi alam yang datar dengan curah hujan cukup. Suhu udara pada titik maksimum berkisar pada 30⁰ C sedangkan suhu minimum bisa mencapai 21⁰ C.

Jarak Wilayah ini ke Ibukota Kabupaten di Pringsewu berkisar kurang lebih 20 Km jauhnya. Sedangkan jarak tempuh dari Kecamatan Adiluwih ke Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) mencapai 105 Km jauhnya.

⁷¹ Arsip Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tanggal 16 mei 2020

Sampai dengan akhir tahun 2006 Kecamatan Adiluwih telah memiliki 17 wilayah administratif dalam bentuk pekon. Tetapi pada bulan Desember 2006, untuk mempersingkat rentang kendali, efisiensi waktu dan sentralisasi pemerintahan, tiga (3) pekon yang semula bergabung dalam Kecamatan Adiluwih (yaitu pekon Waya Krui, Nusa Wungu, dan Sri Rahayu) melepaskan diri dan bergabung dengan Kecamatan yang baru dibentuk yaitu Kecamatan Banyumas. Pada waktu yang hampir bersamaan, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2007, pekon Purwodadi menjadi pekon definitif dan masuk ke wilayah pemekaran pekon Waringin Sari Timur. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 28 Februari 2007 Kecamatan Adiluwih hanya membawahi 13 pekon, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1

Daftar Pekon Kecamatan Adiluwih

No	Nama Pekon	Kepala Pekon
1	Adiluwih	Dedi Sutrisno
2	Bandung Baru	Muhidin (Pj)
3	Enggal Rejo	Rosadi (Pj)
4	Sinar Waya	Yulhaidir
5	Sukoharum	Ridwan
6	Waringin Sari Timur	Ali Mustofa
7	Tri Tunggal Mulyo	Asmudi (Pj)
8	Purwodadi	Subardian

9	Srikaton	Adek Gunawan
10	Tunggal Pawenang	Heru Efendi
11	Kutawaringin	Bace Subarnas
12	Tokokarto	Samad
13	Bandungbaru Barat	Rohidin

3. Aspek Demografis

Kecamatan Adiluwih terdiri dari 13 pekon dengan jumlah KK sebanyak 9.710. Berdasarkan data Sensus bulan Desember 2019 jumlah penduduk Kecamatan Adiluwih tercatat sebanyak 35.243 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18.151 orang dan perempuan sebanyak 17.092 orang, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 2

Sebaran Penduduk Kecamatan Adiluwih

No	Nama Pekon	Kepadatan Penduduk (Km2)	Jumlah Penduduk	Luas (M2)
1	Adiluwih	194	3.666	7.120
2	Bandung Baru	111	5.347	5.940
3	Enggal Rejo	192	1.352	2.600
4	Sinar Waya	203	982	2.000
5	Sukoharum	280	2.011	5.650
6	Waringin Sari Timur	337	2.083	7.020

7	Tri Tunggal Mulyo	256	1.949	5.000
8	Purwodadi	141	2.891	4.080
9	Srikaton	158	2.942	4.650
10	Tunggal Pawenang	183	1.522	2.800
11	Kutawaringin	141	3.061	4.120
12	Tokokarto	134	2.520	3.240
13	Bandungbaru Barat	116	1.878	2.180
	Jumlah	160	35.243	56,400

Dilihat dari segi sebaran usia, penduduk Kecamatan Adiluwih dapat digambarkan secara berikut :

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut umur Tahun 2019

No	Penduduk dan Rumah Tangga	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
1	0-4 Tahun	1780	1685	3465
2	5-9 Tahun	1196	1286	2482
3	10-14 Tahun	1231	1192	2423
4	15-19 Tahun	1361	1395	2756
5	20-24 Tahun	1408	1214	2622
6	25-29 Tahun	1256	1035	2291
7	30-34 Tahun	1673	1287	2960
8	35-39 Tahun	1153	1048	2201
9	40-44 Tahun	1185	1178	2363
10	45-49 Tahun	1207	1157	2364
11	50-54 Tahun	1048	1039	2087
12	55-59 Tahun	1037	1068	2105

13	60-64 Tahun	986	988	1974
14	65-69 Tahun	605	627	1232
15	70-74 Tahun	426	415	814
16	75+	469	485	954
	Jumlah	17183	17099	35243

Ditinjau dari latar belakang suku, Penduduk Kecamatan Adiluwih mayoritas terdiri dari Suku Jawa (75 %), Suku Lampung (18 %), dan Suku Sunda (5 %), dan ada sebagian kecil suku Sumatera Selatan yang tersebar di lima desa,.Walaupun di Kecamatan Adiluwih para penduduk memiliki latar belakang suku yang berbeda (penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang) namun mereka dapat hidup secara rukun, tenteram, dan bersatu dalam kegiatan secara gotong royong.

4. Sektor Agama, pendidikan, ekonomi dan Sosial

Ditilik dari latar belakang agama, sebaran penduduk Kecamatan Adiluwih dapat digolongkan secara berikut :

1. Agama Islam (33.426 jiwa)
2. Agama Katholik (977 jiwa)
3. Agama Prostetan (347 jiwa)
4. Agama Hindu (284 jiwa)
5. Agama Budha (184 jiwa)

Para umat beragama ini memiliki sarana dan prasarana peribadatan secara masing-masing, dengan jumlah sebagai berikut :

1. Masjid 44 Unit
2. Mushola 119 Unit
3. Gereja 7 Unit
4. Pura 2 Unit
5. Kuil (-)

Meski penduduk di wilayah ini terdiri dari penganut-penganut agama yang berbeda, namun perbedaan keyakinan tersebut tidak mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal bidang keagamaan di Kecamatan Adiluwih kerukunan umat beragama antara penduduk terjalin dengan sangat harmonis dan baik.

Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan di Kecamatan Adiluwih terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Sekolah-sekolah tersebut ada yang berstatus negeri (dikelola oleh Pemerintah) adapula yang berstatus swasta (dikelola oleh yayasan-yayasan swasta).

Adapun sebaran jumlah lembaga pendidikan berdasarkan jenjang pendidikannya, adalah sebagai berikut :

- Taman kanak-kanak 6 buah
- Tingkat SD Negeri 33 buah
- MIN 1 buah
- Tingkat SMP Negeri 2 buah
- Tingkat SMP swasta 6 buah

- SLTA Negeri 1 buah
- SLTA swasta 2 buah

Ditilik dari sisi perekonomian penduduk, dapat dikatakan bahwa penduduk Kecamatan Adiluwih mayoritas terdiri dari para petani. Meskipun demikian ada pula warga yang menekuni bidang niaga, peternakan, industri jasa dan lain lain. Sebaran penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian adalah sebagai berikut :

- Petani 25.175 orang
- Peternak 145 orang
- Pedagang 257 orang
- Buruh 125 buah
- Jasa 46 orang

Banyaknya penduduk yang menekuni bidang pertanian ini dapat dimengerti karena lahan yang tersedia di Kecamatan Adiluwih cukup luas yakni 4.605 Ha yang terdiri dari lahan sawah sekitar 292 Ha dan lahan bukan sawah 4313 Ha. Adapun rincian secara detail mengenai penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut :

a. Sawah menurut irigasinya

Irigasi teknis : 0

Tadah hujan : 291 Ha

b. Lahan kering yang diusahakan untuk pertanian

Ladang : 3114 Ha

Perkebunan : 1239 Ha

- c. Lahan kering yang tidak diusahakan bukan untuk lahan pertanian

Perumahan, pemukiman dan bangunan lainnya : 955 Ha

Lahan-lahan yang tersedia itu sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk menanam tanaman palawija, sebagian lagi untuk tanaman hortikultura. Rician luas lahan yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija beserta besaran produksinya dapat difahami lewat tabel berikut:

Tabel 4
Luas produksi tanaman palawija

No	Jenis Tanaman Palawija	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi sawah	542	2788
2	Padi ladang	-	-
3	Jagung	5733	27017
4	Kedelai	-	-
5	Kacang tanah	31	24
6	Kacang hijau	5	4
7	Ubi kayu	88	1760
8	Ubi jalar	-	-
	Jumlah	6399	31593

Sedangkan luas lahan yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman hortikultura beserta hasil produksinya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5
Luas panen produksi tanaman hortikultura

No	Jenis Tanaman Hortikultura	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	-	-
2	Belimbing	-	-
3	Duku	-	-
4	Durian	1	5
5	Jambu air	-	-
6	Jambu biji	-	-
7	Jeruk	-	-
8	Kedondong	-	-
9	Mangga	-	-
10	Manggis	-	-
11	Nangka	-	-
12	Nanas	2	2.5
13	Pepaya	1.20	24.00
14	Pisang	22	330
15	Rambutan	15.00	64.00
16	Salak	-	-
17	Sawo	-	-
18	Sirsak	-	-
	Jumlah	42.2	425.5

Selain dari produksi tanaman palawijaya dan tanaman hortikultura, penduduk Kecamatan Adiluwih banyak pula yang menekuni bidang tanaman perkebunan dan sayur-sayuran sebagaimana diketengahkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Luas panen dan produksi tanaman sayuran

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Aren	-	-
2	Kopi	-	-
3	Cengkeh	-	-
4	Jahe	1.9	28.5
5	Kakao	164	115.2
6	Kapuk randu	-	-
7	Karet	-	-
8	Kayu manis	-	-
9	Kelapa	10.42	445
10	Kelapa hibrida	-	-
11	Kemiri	-	-
12	Kencur	2.4	28.8
13	Kunyit	1.9	288
14	Lada	-	-
15	Lengkuas	230	2300
16	Nilam	-	-
17	Pinang	-	-
18	Pala	-	-
19	Tembakau	10.00	8.00
	Jumlah	1224.5	677

Dengan banyaknya ragam kegiatan ekonomi penduduk sebagaimana digambarkan di atas, dapat dikatakan bahwa penduduk Kecamatan Adiluwih telah mampu berswasembada pangan, bahkan tidak hanya itu, hasil-hasil

pertanian mereka pun dapat dikirim ke luar wilayah sehingga mendatangkan sumber pendapatan tambahan bagi penduduk setempat.

B. Perkembangan Lembaga Pengelola Zakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Sebelum tahun 1990, pengelolaan zakat di kecamatan Adiluwih masih menggunakan manajemen konvensional, dalam arti dikelola oleh individu-individu tertentu secara tradisional dan tidak menggunakan manajemen modern. Individu-individu dimaksud mayoritas adalah para pengurus masjid, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan kepercayaan dan ketokohan mereka.

Namun setelah tahun 1990, pengelolaan zakat di wilayah ini tidak lagi dikelola secara individual melainkan telah meningkat ke arah institusional yang menginduk kepada organisasi-organisasi keagamaan yang ada dalam masyarakat seperti : Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain lain. Karena lembaga itu menginduk pada ormas-ormas keagamaan yang ada maka secara otomatis bidang garap organisasi itu tidak hanya melulu mengurus soal zakat saja melainkan lebih banyak terfokus pada bidang-bidang pelayanan masyarakat seperti : pendidikan, dakwah, penyantunan anak, dan lain lain.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat, maka lembaga pengelola yang menginduk pada bidang tertentu dalam organisasi masyarakat itu mulai memfokuskan

diri hanya dalam pengelolaan zakat saja dan membentuk lembaga baru yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Ketika Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terbit, Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih belum dapat dikatakan berstatus resmi karena pembentukan lembaga tersebut, berikut izin operasionalnya, hanya berlandaskan kepada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi induk. Berkat sosialisasi yang terus menerus dan disertai dengan dukungan dari pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan baik di tingkat Pusat maupun daerah daerah, secara berangsur-angsur satu persatu lembaga-lembaga yang ada itu mulai memperoleh status legalitas operasionalnya. Legalitas ini ditunjukkan dengan keluarnya izin operasional dari sejumlah lembaga yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Izin tersebut diberikan setelah lembaga yang diusulkan memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁷²

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, hingga saat ini di Kecamatan Adiluwih telah berdiri sebanyak 163 Lembaga Amil Zakat.⁷³ Hampir seluruh lembaga-lembaga Amil Zakat tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan legalitas formalnya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa masing-masing lembaga Amil Zakat telah memiliki Surat Izin operasional dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama

⁷²Bahrudin, Wawancara dengan Penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020.

⁷³ Nurhadi, wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020

dan BAZNAS. Izin operasional itu memiliki masa berlaku hingga 5 tahun. Dan setelah itu harus diperbaharui kembali. Pembaruan SK memerlukan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang meliputi susunan personalia Pengurus mulai dari Dewan Penyantun, Pengurus Harian (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) hingga ke tingkat anggota.⁷⁴

Di luar dari lembaga-lembaga yang telah mendapatkan legalitas dan izin operasional tersebut, ada sejumlah kecil lembaga yang belum mendapatkan izin karena sedang dalam tahapan proses pengurusan administrasi. Harus diakui bahwa rentang koordinasi administrasi perizinan tersebut memang relatif cukup panjang dan memakan waktu, dimulai dari pengurusan di tingkat kecamatan, lalu ke tingkat Kabupaten, selanjutnya ke tingkat provinsi, hingga akhirnya ke tingkat nasional.

Dapat dikemukakan bahwa seluruh lembaga-lembaga zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih memusatkan kegiatan mereka di masjid atau musholla yang ada di dusun masing-masing. Lokasi operasional ini dipilih karena semua Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada belum memiliki gedung kantor sendiri. Selain dari di masjid atau di musholla terkadang operasional dilaksanakan juga di rumah kediaman Ketua LAZ atau di tempat lain yang memungkinkan untuk ditempati.⁷⁵

Untuk kegiatan yang berbentuk rapat/pertemuan internal pengurus, atau ketika ada pemeriksaan soal keuangan dari lembaga-lembaga tertentu, kebanyakan dilakukan di rumah ketua. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan

⁷⁴ Mahali, Wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020

⁷⁵ Nurhadi, wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020

yang menyangkut penerimaan hingga pendistribusian hasil zakat, kebanyakan dilakukan di masjid atau musholla, dengan dihadiri oleh para mustahiq.⁷⁶

Jenis-jenis zakat yang dikumpulkan melalui amil zakat umumnya terdiri dari dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat-zakat itu terkumpul melalui mekanisme muzaki datang sendiri ke amil dan menyerahkan zakat mereka. Hampir tidak pernah personil ‘amil datang ke muzaki secara *door to door* untuk melakukan pengumpulan zakat karena biasanya zakat-zakat itu dikeluarkan oleh para muzaki hanya pada waktu-waktu tertentu, terutama di bulan Ramadhan.

Sebelum harta zakat didistribusikan, para ‘amil biasanya melakukan rapat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai mustahik berikut besaran yang akan mereka terima. Hal ini dilakukan agar pendistribusian harta zakat tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Syari’at dan tepat sasaran. Pola pembagian umumnya dilakukan dengan menetapkan 5 (lima) asnaf/golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, fisabilillah, dan ibnu sabil.⁷⁷

Untuk menetapkan porsi pembagian para mustahiq, penetapan dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional dan bukan secara pukul rata. Proporsi yang paling besar biasanya diperuntukkan untuk kelompok fakir dan miskin, kemudian di susul dengan Ibnu sabil, Sabilillah dan terakhir untuk para ‘amil. Ada beberapa Lembaga Amil zakat yang membedakan porsi

⁷⁶ Mahali, Wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020.

⁷⁷ Bahrudin, Wawancara dengan Penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020.

pembagian antara kelompok fakir dengan kelompok yang miskin, namun ada pula yang menyamaratakan saja tanpa membedakan porsi perolehan mereka. Bagi Lembaga Amil Zakat yang membedakan porsi pembagian antara kelompok fakir (anak-anak yatim/piatu, janda-janda tua, penyandang disabilitas, dll) dengan kelompok miskin, porsi kelompok fakir biasanya dibuat lebih besar dari kelompok miskin. Dasar pertimbangan mereka adalah karena kelompok fakir memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar dari kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kelompok fakir dipandang memiliki kebutuhan yang lebih besar dari kelompok miskin dikarenakan mereka sama sekali tidak memiliki harta, pekerjaan ataupun sumber penghasilan, sehingga hidup mereka sangat bergantung kepada santunan dari lingkungannya. Sedangkan kelompok miskin, mereka ini umumnya memiliki penghasilan, namun penghasilan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁷⁸ Model pembagian semacam ini menurut penulis sangat tepat karena akan lebih menjamin pembagian harta zakat yang adil dan tepat sasaran.

Terkait dengan porsi amil, penetapan porsi dilakukan berdasarkan pertimbangan person. Dalam arti, jika untuk pembagian porsi selain amil dipertimbangkan pula jumlah jiwa yang menjadi tanggungan para mustahiq, maka dalam pembagian hak para amil hanya dihitung person tanpa memasukkan perhitungan jumlah anggota keluarganya. Penetapan ini menurut penulis sudah tepat karena hitungan porsi personel amil memang

⁷⁸ Marsudi, Wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020

cukup disandarkan kepada jumlah personnya saja. Perlu ditegaskan pula di sini bahwa meskipun amil zakat itu sifatnya kelembagaan, namun pengurusnya tidak memperoleh honor ataupun tambahan pemasukan lain; jadi semata-mata hanya memperoleh apa yang memang sudah menjadi haknya sebagai amil.⁷⁹ Selanjutnya, setelah daftar calon penerima berikut besaran perolehannya masing-masing ditetapkan, barulah harta zakat yang ada dibagi dan didistribusikan langsung kepada mustahiqnya. Demikianlah pola penetapan porsi pembagian harta zakat yang umum diberlakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat di Kecamatan Adiluwih.

Terkait dengan kompetensi personil pengurus lembaga amil zakat, dapat dikemukakan di sini bahwa tidak semua anggota pengurus memiliki kompetensi/skill yang memadai yang berhubungan dengan tugas yang diembannya. Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan di lapangan, hanya beberapa lembaga amil zakat saja yang pengurus yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi. Mayoritas lembaga melakukan pembukuan keuangan hanya berdasarkan catatan-catatan biasa yang sifatnya konvensional, dan belum menggunakan metode akuntansi modern. Meskipun demikian, catatan-catatan itu sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus dalam pengelolaan harta zakat, sehingga jika dilakukan audit, data-data pendukung tersedia meski tersaji dalam bentuk yang masih konvensional. Adapun yang berkaitan dengan kemampuan kesekretariatan, umumnya lembaga-lembaga yang ada memiliki personil yang menguasai komputer dan mengerti tentang

⁷⁹ Marsudi, Wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020

tata administrasi/persuratan kelembagaan. Demikian pula halnya dengan latar belakang pengetahuan keagamaan pengurus, hampir semua lembaga memiliki pengurus/dewan pengawas yang memahami seluk beluk hukum Islam. Walaupun, harus diakui tidak semua anggota pengurus memiliki kompetensi semacam itu, karena banyak juga di antara personil pengurus yang tidak begitu mendalam pengetahuannya tentang fiqh/ushul fiqh.

Berkait dengan program kerja kelembagaan, dapat dikatakan bahwa semua lembaga amil zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih memiliki program tertentu yang disusun dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Program-program itu umumnya masih bersifat konsumtif dan belum mengarah kepada pengembangan ekonomi produktif, dikarena besaran pemasukan yang diperoleh dari para muzakki sementara ini baru sebatas pemenuhan kebutuhan mendesak para warga semata.⁸⁰

Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, hampir semua lembaga-lembaga amil zakat di Kecamatan Adiluwih telah melakukan pembukuan yang baik menyangkut penerimaan dan pengeluaran harta zakat yang diamanatkan umat kepada pengurus. Buku-buku kas itu disimpan oleh Bendahara dan secara berkala diperiksa oleh badan pengawas dari LAZISNU kecamatan .⁸¹

⁸⁰ Nurhadi, wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020.

⁸¹ Marsudi, Wawancara dengan penulis, Kecamatan Adiluwih, 13 Juni 2020.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Untuk mengukur sejauhmana ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 18 UU Nomor 23 tahun 2011 telah terimplementasi dengan baik, diperlukan adanya tolok ukur yang tepat dan berlandaskan kepada apa yang telah dimuat dalam perundang-undangan. Tolok ukur dimaksud meliputi 8 (delapan) kriteria sebagaimana diketengahkan berikut ini.

Pertama; Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam Islam pendidikan, dakwah, dan sosial:

Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, semua Lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu memiliki latar belakang organisasi kemasyarakatan yang resmi. Sebagian besar menginduk kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah mapan, seperti organisasi Nahdhatul ‘Ulama dan Muhammadiyah, sementara sebagian kecil berdiri atas inisiatif swadaya masyarakat. Organisasi-organisasi dimaksud ada yang khusus memberikan pelayanan di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, kegiatan sosial (penyantunan kaum dhu’afa dan anak yatim), dan lain-lain. Semuanya telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undang pada poin yang pertama ini telah terimplementasi dengan baik.

Kedua; Berbadan hukum:

Sejak tahun 1990 semua pengelolaan Zakat di Kecamatan Adiluwih tidak lagi dilakukan secara personal dan konvensional melainkan telah dikelola oleh suatu organisasi berbadan hukum yang memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Fakta ini menunjukkan bahwa persyaratan kedua ini telah diimplementasikan secara baik dan utuh sehingga menjamin efektivitas pengelolaan zakat.

Ketiga; Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

Rekomendasi Baznas merupakan salah satu syarat untuk dapat dikeluarkannya izin operasional lembaga. Oleh karena semua Lembaga Amil Zakat yang ada telah memperoleh izin operasional dari kementerian maka fakta itu secara otomatis menggambarkan bahwa masing-masing lembaga telah juga memiliki rekomendasi dari BAZNAS. Oleh karena hampir semua Lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu telah memiliki Surat Izin operasional dari lembaga yang berwenang, maka fakta itu secara otomatis menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang pada poin yang ketiga ini telah pula terimplementasi dengan sempurna.

Keempat; keberadaan pengawas syariat:

Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu, lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih kebanyakan belum memiliki lembaga

Pengawas Syari'at yang bertugas untuk mengawasi operasional lembaga agar berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at. Kebanyakan hanya disandarkan kepada figur-figur tertentu yang sifatnya perseorangan yang kebetulan ikut dilibatkan dalam kepengurusan lembaga amil zakat. Ke depan poin ini perlu memperoleh perhatian dari semua pihak agar kinerja LAZ dapat semakin berkualitas dan memenuhi semua prinsip yang telah ditentukan oleh Syara'.

Kelima; Memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan administrasi dan keuangan yang memadai.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, tidak semua personil pengurus lembaga amil zakat memiliki kompetensi/skill yang memadai yang berhubungan dengan tugas yang diembannya. Hanya beberapa lembaga amil zakat saja yang pengurus yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi, sementara mayoritas lembaga melakukan pembukuan keuangan hanya berdasarkan catatan-catatan biasa yang sifatnya konvensional, dan belum menggunakan metode akuntansi modern. Meskipun demikian, hal itu sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus dalam pengelolaan harta zakat, sehingga jika dilakukan audit, data-data pendukung tersedia meski tersaji dalam bentuk yang masih konvensional. Adapun yang berkaitan dengan kemampuan kesekretariatan, umumnya lembaga-lembaga yang ada memiliki personil yang menguasai komputer dan mengerti tentang tata administrasi/persuratan kelembagaan. Demikian pula halnya dengan latar belakang pengetahuan keagamaan pengurus, hampir semua lembaga memiliki pengurus yang memahami seluk beluk hukum Islam. Walaupun, harus diakui

masih banyak anggota pengurus yang belum memiliki kompetensi semacam itu.

Keenam; Bersifat nirlaba:

Sesuai dengan watak dasarnya, lembaga amil zakat sama sekali tidak ditujukan untuk menjadi suatu lembaga yang mengejar profit/keuntungan yang berupa uang atau hal lainnya, melainkan lebih fokus ke tujuan pokoknya yakni sebagai lembaga fasilitator yang bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam. Karakter ini nampak tercermin secara jelas di Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan, yang ini ditunjukkan dengan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ketujuh; Memiliki program kerja yang konkrit dan feasibel

Untuk mendayagunakan zakat demi mendukung kesejahteraan umat: LAZ di kecamatan adiluwih seluruhnya telah mempunyai program kerja yang jelas. Walaupun harus diakui bahwa hampir semua program-program yang ada masih bersifat konsumtif dan belum ditingkatkan kepada pengembangan ekonomi produktif.

Delapan; Siap diaudit secara berkala:

Seperti telah dikemukakan di bab terdahulu, semua lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih telah memiliki buku kas yang memuat catatan tentang arus *cashflow* keuangan. Meskipun buku-buku kas yang ada masih berdasarkan catatan-catatan biasa dan bersifat konvensional, namun hal itu sudah memadai dan sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus dalam pengelolaan harta sehingga jika sewaktu-waktu diadakan audit, lembaga

tersebut dapat dikatakan siap karena memiliki data-data pendukung yang diperlukan.

Delapan indikator di atas menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat di Kecamatan Adiluwih telah berjalan secara baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Fakta itu sekaligus menunjukkan bahwa lembaga amil zakat di Kecamatan Adiluwih sudah pula menjalankan tugasnya secara optimal sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.

B. Analisis *Maqashid Syariah*

Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dengan memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi suatu rumusan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Oleh karena *Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan kemaslahatan yang berasal dari Tuhan, maka jika kemaslahatan itu tercapai maka hal itu berarti bahwa maksud atau tujuan dari Tuhan telah terwujud. Sebaliknya, jika maksud itu tidak tercapai maka itu berarti bahwa apa yang diinginkan oleh Allah yang terkandung dalam perintah/larangannya yang berupa manfaat/kemaslahatan untuk kepentingan manusia tidak berhasil diwujudkan. Manfaat atau kemaslahatan di sini tidak hanya sebatas kemaslahatan duniawi, melainkan juga meliputi kemaslahatan ukhrowi, karena jika hanya memberikan

kemaslahatan duniawi maka hal ini bukanlah *maqashid al-syari'ah* yang sesungguhnya.

Terkait dengan masalah pengaturan dan pendirian lembaga Amil Zakat, jika dilihat dari perspektif *Maqashid al-syari'ah*, hal ini menunjukkan beberapa hal positif sebagaimana diketengahkan berikut ini :

Pertama, Terpeliharanya kepentingan agama'.

Zakat adalah salah satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi salah satu pilar dalam rukun Islam. Dengan terlaksananya perintah-perintah Syara' secara baik, maka hal itu akan memberi dampak positif bagi terwujudnya kehendak Allah melalui hukum-hukum Syara' di bumi persada ini.

Selain daripada itu, zakat menjadi sarana pencegah kekufuran karena kefakiran. Dengan terlaksananya zakat maka distribusi kekayaan tidak hanya terpusat di kalangan kaum *aghniya'* tetapi mengalir juga ke kalangan kaum *dhu'afa*. Dengan tercegahnya penganut agama dari perbuatan kufur karena miskin secara otomatis mencegah berkurangnya jumlah penganut agama dan itu berarti bahwa kepentingan agama menjadi terlindungi. Dengan penggambaran ini nampaklah dengan jelas bahwa pengaturan lembaga amil zakat memiliki relevansi yang sangat erat dengan kepentingan agama.

Kedua : Menjaga jiwa.

Zakat merupakan jembatan antara kaum *dhu'afa* dengan kaum *aghniya'*. Dengan adanya zakat maka hubungan sosial antara kedua elemen masyarakat itu dapat terbina dengan baik dan berjalan secara harmonis. Jika orang-orang

miskin tidak mendapatkan jalan keluar atau bantuan dalam menghadapi beban kesulitan hidup, maka hal itu akan berpotensi untuk mendorong timbulnya tindakan kriminal yang dapat mengancam hilangnya harta atau bahkan juga nyawa. Dengan adanya pengaturan yang mengarah kepada terwujudnya keberadaan lembaga sosial yang kredibel akan memfasilitasi hubungan antara kaum *aghniya* dengan kaum *dhu'afa* sehingga potensi ketegangan antar elemen soaial ataupun dorongan untuk bertindak kriminal dapat tercegah, Di sinilah teletak relevansi pengaturan lembaga amal zakat dengan kepentingan umat khususnya perlindungan harta dan nyawa.

Ketiga : Mewujudkan harta yang suci dan berkah.

Harta dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu fasilitas yang mengandung aspek ekonomis saja melainkan juga mengandung nilai spiritual. Hal ini dapat disimak dari latar belakang perintah berzakat sebagaimana yang tersebut dalam al-Qur an surah al-Taubah : 103. Dalam ayat tersebut secara jelas disebutkan bahwa zakat itu bertujuan untuk membersihkan dimensi spiritual harta. Dengan dikeluarkannya zakat maka harta yang dimiliki menjadi bersih dan suci, dan ini berarti bahwa pemilik harta akan terhindar dari kepemilikan harta yang kotor dan tidak barokah. Karena itu, keberadaan aturan yang akan mewujudkan lembaga fasilitator yang kredibel dan amanah menjadi suatu keniscayaan, dan inipun relevan dengan salah satu prinsip *Maqashid al-syari'ah* yakni menjaga harta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan kepada uraian yang telah diketengahkan secara panjang lebar pada bab bab terdahulu dapatlah diambil beberapa pokok kesimpulan, sekaligus menjadi jawaban terhadap inti permasalahan dalam penelitian ini, secara berikut :

1. Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat yang dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu secara umum sudah berjalan menuruti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, Hal ini didukung oleh sejumlah fakta bahwa (a) Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada umumnya sudah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial; (b) berbadan hukum (c) telah mendapatkan rekomendasi dari Baznas, (d) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya (e) memiliki program yang mensejahterahkan umat, (f) bersifat nirlaba (g) Memiliki program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat (h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2. Pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* khususnya dalam rangka mencapai maksud menjaga

kepentingan agama, menjaga kepentingan jiwa dan dan menjaga kepentingan harta.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada semua pengurus lembaga amil zakat di Kecamatan Adiluwih untuk tetap menjaga amanah ummat yang diberikan kepada mereka serta senantiasa bekerja dengan tulus iklas untuk mencapai kemakmuran umat;
2. Diharapkan program-program yang disusun dikembangkan cara kreatif dan mengacu kepada semangat ekonomi produktif agar pemberian zakat kepada mustahiq tidak hanya memberikan hasil yang bersifat konsumtif-temporer melainkan juga produktif dan berkelanjutan.
3. Diperlukan adanya penyuluhan dari instansi-instansi tertentu tentang pola pembagian porsi kelompok asnaf, sehingga porsi pembagian kelompok fakir dibesarkan dibanding dengan kelompok lainnya, mengingat kelompok ini memiliki kebutuhan yang lebih darurat dan mendesak ketimbang kelompok lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2016). *Fiqh Ibadah*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung .
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.
- al-Suyuti, I. (2011). *Tarikh Khulafah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian* . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, S. (1984). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Febriadi, S. R. (2017). *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*. Amwaluna.
- Hamid, A., & Saebani, B. A. (2010). *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayat, Y. (2008). *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press.
- Jauhar, A. A.-M. (2013). *Maqashid Syaariah*. Jakarta: Amzah.
- Jaya, A. (1996). Konsep Maqashid As-Syariah Menurut Akitab al-Syatibi. Dalam Basri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, I. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Lutfi, H. (2018). *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

- Mas'udi, M. f. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*. Jakarta: Piramedia.
- Moleong, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. (1984). *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Prgresif.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Qardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Bandung: PT.Pustaka Mizan.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Al-Hanan.
- Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual*. Semarang: Pustaka Pelajar Offseet.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Subagyo, j. (1994). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sukardi. (2014). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

Susiadi. (2016). *Metode Penelitian* . Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN

Raden Intan Lampung: Bandar Lampung.

Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Umam, K., & aminudin, a. (2001). *Ushul Fiqh II* . Bandung: Pustaka Setia.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

JURNAL

Cahyani, A. (2014). Teori dan Aplikasi Maqashid ASy-Syariah. Al-Qadau, <http://journal.Uin-jalaludin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637>.

Jalaludin, M.M. (2015). *Pemikiran Abu Ishaq al-syatibbi dalam kitab al-muwafaqat*. Di akses minggu 8 maret 2020, dari http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_Sdt=0%2C5&q=Maqashid&btnG=,.

Zaki, M. (2015). Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah, *jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.

ARTIKEL

Wibowo, A. (2012). *Mengelola Asy Syariah*. Di akses pada 8 maret 2020, dari <http://sta.ff.uny.ac.id/sites/default/file/pendidikan/arif%20wibowo,%20mei/ISLAM%20PINFINANCE%2004%20%Maqashid%20ASY%20Syariah.pdf>,.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat.



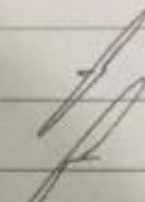
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

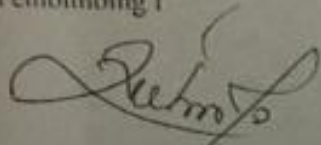
BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anisa Meilia
NPM : 1621020151
Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi
Pasal 18 Uu No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat
(Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf	
			Pemb.I	Pemb.II
1	26 Desember 2019	Bimbingan Proposal		
2	30 Desember 2019	Acc Proposal		
3	17 Januari 2020	Bimbingan BAB I		
4	20 Januari 2020	Bimbingan BAB I		
5	6 Februari 2020	Bimbingan BAB II		
6	19 Maret 2020	Bimbingan dan Revisi BAB II		
7	14 Juli 2020	Bimbingan BAB I-V		
8	24 Juli 2020	Bimbingan dan Revisi BAB I-V		
9	19 Agustus 2020	Bimbingan dan Revisi BAB III-V		
10	24 Agustus 2020	Bimbingan BAB III-V dan Revisi		

11	26 Agustus 2020	Bimbingan BAB III-V		
12	12 Oktober 2020	ACC SKRIPSI FINAL		

Pembimbing I



Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

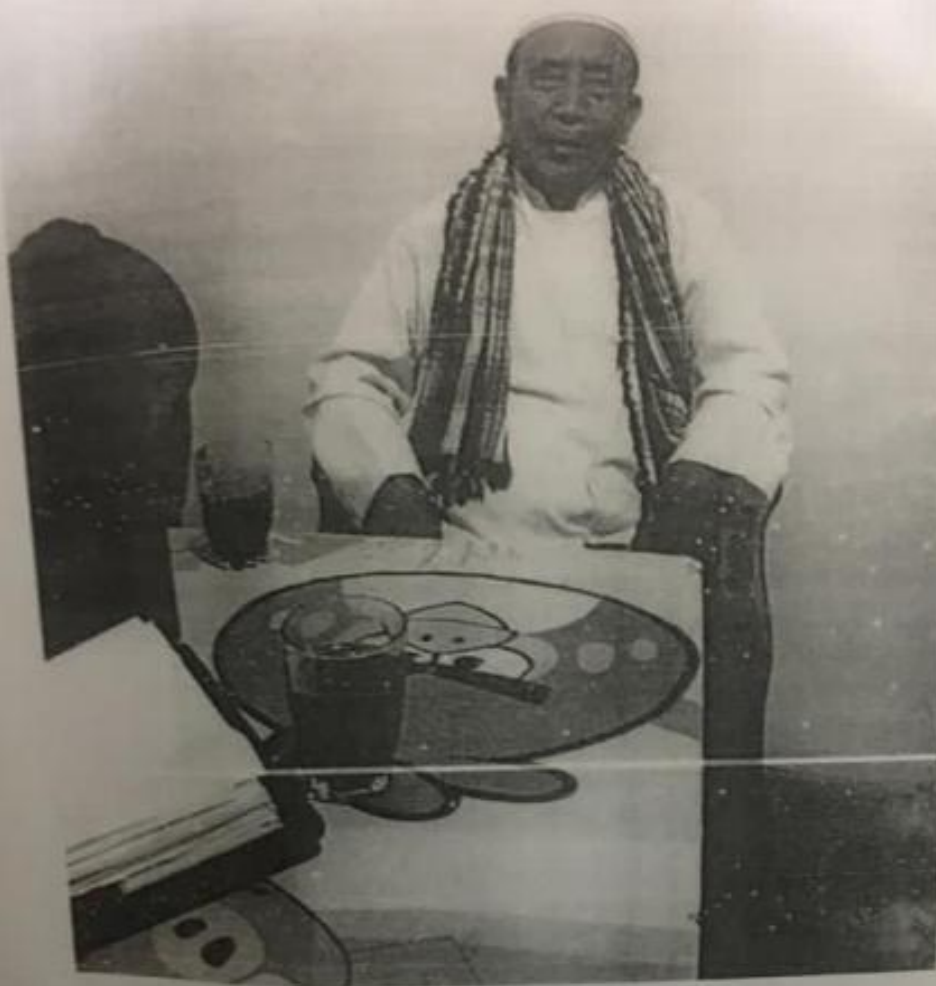
Pembimbing II



Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Keterangan:

1. Jika blanko telah penuh disambung kehalaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.







**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

REKOMENDASI PENELITIAN DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/0202/V.16/2020

DASAR

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMBACA

1. Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1335/Un.16/DS/PP.009/8/2020 Tanggal 18-08-2020 perihal Permohonan Izin Riset
2. Proposal Penelitian

MEMPERHATIKAN

MEREKOMENDASIKAN :

- | | |
|----------------------|--|
| Nama / NPM / NIP | : ANISA MEILIA / 1621020151 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tgl.Lahir | : Margorejo / 04-05-1997 |
| Alamat | : Enggal Rejo RT/RW. 008/004 Kec. Adiluwih Kabupaten Pringsewu |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Tujuan | : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi |
| Lokasi Penelitian | : Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu |
| Judul Penelitian | : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU No.23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) |
| Waktu yang diberikan | : 01 September 2020 s/d 02 November 2020 |

Dengan Ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk Kepentingan Penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Penanggungnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemohon Agar senantiasa Mematuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. OUDROTUL IKHWAN, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 35650107 199402 1 001

Tambahan :

1. Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pringsewu;
2. Camat Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK

Jl. KH.Ghalib No. 650 Pringsewu Barat KodePos 35373
Pringsewu - Lampung

IZIN PENELITIAN / RISET / SURVEI / PENGABDIAN / KKN / PKI

Nomor : 070/10/LL.02/IX/2020

Membaca : Surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, Jl. Letkol. H. Endro Suatmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289. Nomor : B.1335/Un.16/DS/PP.009/8/2020 Tanggal: 18 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Izin Riset.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintahan Daerah.

Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama / NPM : Anisa Mellia / 1621020151.
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
Alamat : Pekon Enggal Rejo Rt/Rw. 08/04, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu.
Lokasi : Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
Waktu Penelitian : Bulan September 2020 - Sampai Dengan Selesai.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
Judul Kegiatan : "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU no. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)".

Catatan : Setelah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis Kepada Bupati Pringsewu melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pringsewu.

Dikeluarkan di : Pringsewu
pada tanggal : 10 September 2020

D. H. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA BIDANG



Muhammad Nurin, STP.
Pembina IV / IV.a
NIP. 196205121998031005

Tembusan :
1. Bupati Pringsewu dan Wakil Bupati Pringsewu (sebagai laporan).
2. Sek. Camat Adiluwih.
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

KECAMATAN ADILUWIH

Alamat: Jl. Gajah Mada 1 Adiluwih - Pringsewu Pos. 35674

Adiluwih, 16 Oktober 2020

Nomor : 450/ /C.01/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Nomor : B. 1335/Un.15/DS /PP.009/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal
Permohonan Ijin Riset Mahasiswa, Dengan ini Kami memberikan ijin kepada :

Nama : ANISA MEILIA
NPM : 1621020151
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Tata Negara (Siyasyah Syari'yyah)
Judul Penelitian : Analisis Maqosid Syariah terhadap implementasi pasal 18
UU Nomor. 23/2011 Tentang pengelolaan zakat (Studi di
Kecamatan adiluwih Kabupaten Pringsewu)
Waktu yang diberikan : 01 September 2020 s/d 02 November 2020

Demikian Surat Ijin ini diberikan kepada nama tersebut di atas untuk dapat
dipergunakan sebagai mana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor.: B-132/ Un.16 / WR.1 /KT/ 010 / 2020

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP : 196201111994031001
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul:
ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 18 UU NO. 23/2011
(Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
ANISA MEILIA	1621020151	FSH/HTN(SS)

Bebas plagiarasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 19 %. Dan dinyatakan *lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2020
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP.196201111994031001

Kes:

1. Surat keterangan Cek Turnitin sah, dengan stempel asli Pusat Perpustakaan
2. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk Repository
3. Tempat cek turnitin dilaksanakan di Prodi HTN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Sutomo Sukatane I Telp./Fax. (0721) 703289
Bandar Lampung 35131

Surat Keterangan Hasil Pengecekan Turnitin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Meilia

NPM/Prodi : 1621020151/HTM (syariah)

Judul : Analisis Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pasal 18 UU No.
23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewa)

Skor : 19%

Telah melakukan pengecekan skripsi dengan aplikasi turnitin dan dinyatakan **LULUS**.

Petugas,

Hervin Yoki Pradikta, MHI

Bandar Lampung, Oktober 2020
Ketua Prodi HTN,



Pradikta, M.Si.

“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU No. 23/2011 (Studi di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	8%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	<1%
8	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1%

9	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
10	countryoffashion.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
12	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
14	indeksprestasi.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	Pajrun Kamil. "Peran Dakwah Melalui Media Cetak Untuk Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Terhadap Peran Majalah Suara Hidayatullah Lampung)", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019 Publication	<1 %
16	issuu.com Internet Source	<1 %
17	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
18	qazuma.blogspot.com Internet Source	<1 %

19	Dianing Ratna Wijayani. "Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017 Publication	<1 %
20	maqasidalsyariaah.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %
22	ciar-ciar.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
24	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
25	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
26	docplayer.info Internet Source	<1 %
27	bang-tobing.blogspot.com Internet Source	<1 %

28

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

29

repo.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

30

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

31

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

32

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

33

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off